INFORMASI

KEPADA : **YTH.** Ka Bag Hukum

DARI : Ka Sub Bag Ken Sep.

PERIHAL : Konsep 2 bh SK.

Dengan ini diinformasikan bahwa atas dasar arahan pimpinan saya diberi tugas untuk membuat konsep 2 bh SK sebagaimana terlampir.

Untuk itu mohon koreksi dari Bagpak.

23/6 [illegible]

Catatan

SK kama kedwanya juga dilampirkan.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I

Nomor : 848/SK.75-Keu/1990.

Tentang :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER DAERAH DAN KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor: 841/SK. 82-KEU/89 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, dan Tenaga-Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah ditiap dinas dipekerjakan tenaga sukarela dengan diberikan imbalan berupa upah harian;

c. bahwa ditinjau perkembangan perekonomian dewasa ini pemberian upah kepada tersebut pada butir a dan b sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa mengenai besarnya upah kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi - Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor 841/SK.62-KEU/1989 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar - Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehari.

Ketiga : Disamping menerima Upah Harian sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" di atas, kepada para pekerja harian setiap bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang besarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi - yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras bagi yang sudah kawin a Rp 525,00/kg.

Keempat : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar..... Rp 31.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... Rp 35.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas ..... Rp 40.000,00
d. Sarjana Muda ..... Rp 44.000,00
e. Sarjana Lengkap ..... Rp 53.000,00

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 22 - 3 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I

H. SUKO MARTONO

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
9. Para Kepala Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

DISARPUS KAB BEKASI

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I

Nomor : [illegible]

Tentang :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN DAN TENAGA HONORER DAERAH
PEMERINTAH KEPADA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

PERTIMBANGAN : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 1 Mei 1985 Nomor: 56.2/HK - [illegible]/[illegible]/1985 tentang Penetapan upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, dipandang [illegible] dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.

b. Bahwa berhubung dengan [illegible] perlu untuk menjajau kembali besarnya upah Pekerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah tersebut.

c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 10 tahun 1968 tanggal 11 Mei 1968 tentang Pengesahan Anggaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Tahun Anggaran 1968 / 1969.

[illegible].....

SALINAN : disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Yth Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Yth Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
4. Yth Bapak Pembantu Gubernur Wilayah IV di Purwakarta.
5. Yth Bapak Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung.
6. Yth Sdr Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
7. Yth Sdr Wali Kota Administratip Bekasi.
8. Yth Sdr Pembantu Bupati Wilayah I a/d IV dalam lingkungan Pemda Bekasi.
9. Yth Sdr Kepala Bagian/Biaus/Instansi dalam lingkungan Pemda Tingkat II Bekasi.

DISARPUS KAB BEKASI

M E M U T U S K A N.

MENETAPKAN :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Tanggal 1 Mei 1985 Nomor 56.../HK-SK/KU.333/VI/85- tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Kontrak - Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Pekerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) sehari.

Ketiga : Disamping menerima Upah Harian sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" di atas, kepada para Pekerja Harian setiap bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang besarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi - yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras bagi yang sudah kawin a Rp 450,00/kg.

Keempat : Menetapkan kembali Upah Tenaga Kontrak Daerah setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar.....	Rp	27.650,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama.....	Rp	31.650,00
c. Sekolah Lanjutan Atas.....	Rp	35.650,00
d. Sarjana Muda.....	Rp	39.700,00
e. Sarjana Lengkap.....	Rp	47.750,00

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku surat sejak tanggal 2 Januari 1989, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B E K A S I.
PADA TANGGAL : 10 - 3 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II.
B E K A S I

H. BUKU MARTONO.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I

Nomor : 340.1 /SK. 400- Kpw/1990

Tentang :

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN UANG PIKET KEPADA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan prestasi kerja para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, perlu adanya penyesuaian uang piket Satuan Polisi Pamong Praja;

b. besarnya bantuan uang piket tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah T.K. II Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-608 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD;

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Pemberian bantuan uang piket kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

Kedua : Besarnya bantuan uang piket tersebut diktum pertama sebesar Rp 2,500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) perorang, setiap selesai menjalankan tugas piket selama 1 x 24 jam;

Ketiga : Bantuan uang piket ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i,
Pada tanggal : 12 - 7 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I

H. SUKO MARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Gubernur Kepala Daerah T.K. I Jawa Barat.
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten D.T. II Bekasi.
7. Walikota Bekasi.
8. Pembantu Bupati dalam lingkungan Pemda T.K. II Bekasi.
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkunga Pemda Tingkat II Bekasi

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I

Nomor : 840/SK.75-Keu/1990.

Tentang :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA BULUREN DAERAH DAN KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor: 841/SK. 63-Keu/89 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, dan Tenaga-Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah ditiap dinas diperkerjakan tenaga sukarela dengan diberikan-imbalan berupa upah harian;

c. bahwa ditinjau perkembangan perekonomian dewasa ini pemberian upah kepada tersebut pada butir a dan b sudah tidak - sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa mengenai besarnya upah kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi - Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1989/1990.

M E N E T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 30 Maret 1989 Nomor 841/SK.62-KEU/1989 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar - Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehari.

Ketiga : Disamping menerima Upah Harian sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" di atas, kepada para pekerja harian setiap bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang besarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi - yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras bagi yang sudah kawin a Rp 525,00/kg.

Keempat : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar	Rp	31.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama	Rp	35.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas	Rp	40.000,00
d. Sarjana Muda	Rp	44.000,00
e. Sarjana Lengkap	Rp	53.000,00

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 22 - 3 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I

H. SUKO HARTONO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Penerbitan Perusahaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
9. Para Kepala Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I

Nomor : 840/SK.73-Keu/1990.

Tentang :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER DAERAH DAN KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1989 Nomor 841/SK. 60-KEU/89 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, dan Tenaga-Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan sehari daerah ditiap dinas dipekerjakan tenaga honorer dengan diberikan-imbalan berupa upah harian;

c. bahwa ditinjau perkembangan perekonomian dewasa ini pemberian upah kepada tersebut pada butir a dan b sudah tidak - sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa mengenai besarnya upah kerja perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi - Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 29 Maret 1989 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 10 Maret 1988 Nomor 841/SK.62-KSU/1988 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebesar - Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sehari.

Ketiga : Disamping menerima Upah Harian sebagaimana tersebut pada diktum "Kedua" di atas, kepada para pekerja harian setiap bulannya diberikan pula bantuan/tunjangan pangan yang besarnya minimum sama dengan 10 (sepuluh) kg beras bagi - yang tidak kawin dan minimum 25 (dua puluh lima) kg beras bagi yang sudah kawin a Rp 525,00/kg.

Keempat : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar..... Rp 31.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama ..... Rp 35.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas ..... Rp 40.000,00
d. Sarjana Muda ..... Rp 44.000,00
e. Sarjana Lengkap ..... Rp 53.000,00

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 April 1990 tahun anggaran 1990/1991, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 22 - 3 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I,

H. SOKO HARTOYO.

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat;
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
9. Para Kepala Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

DISARPUS KAB.BEKASI

Kepada : Ttk. Bph. Sekwilda / Bph. Assda III

Dari : Ka Bag Keuangan.

Perihal :

- Untuk upah kontrak kerja tercantum dalam rencana SK ini pada lectum ke-4, disamakan dg honorarium Honorer Daerah.
- Demikian, untuk selanjut nya mohon paraf Bph.

5
27
2

Tanp / hon - Jadi
[illegible]
[illegible]

Drs. OMAN TURYANA

28745 z Karawang
46957 b yan pst /kw92 sga jakart 04285 198 188 5 2200.

segera
Kepala Kantor kas negara
karawang

tlg-2/a/1990 kp/a/a.52/1

mendahului diterbitkannya peraturan pemerintah dan se - DJA tentang kenaikan TPP sebesar sepuluh per seratus, dengan ini diberitahukan bahwa TPP yang semula lima belas per seratus, terhitung mulai bulan Januari 1990 menjadi dua puluh lima per seratus dari penghasilan.
sehubungan dengan itu dintruksikan sbb. :

aa. Agar segera memberitahukan kepada Kepala Kantor/pembuat daftar gaji dalam wilayah pembayaran Saudara tentang kenaikan TPP tersebut .

bb. Petunjuk tentang tata cara pemerian TPP agar diperhatikan ketentuan dalam SE DJA No.SE-6/a/1989 tgl.7 Januari 1989 dan SE DJA No.SE-7/a/1989 tgl. 7 Januari 1989 serta telegram DJA No.tlg-15/a/1989 tgl.22 Pebruari 1989.

cc. Berhubung gaji bulan Januari 1990 telah dibayarkan, maka kekurangan TPP bulan Januari 1990 digabungkan dalam daftar gaji bulan Pebruari 1990.

dd. Terhadap SPP gaji bulan Pebruari 1990 yang sudah diterima agar perhitungan TPP dilakukan oleh KPN termasuk kekurangan TPP bulan Januari 1990.

ee. Ketentuan mengenai kenaikan ini berlaku pula untuk penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun.

ff. Dintruksikan agar para Kepala Kanwil mengawasi pelaksanaannya.

Dir. Jen. Anggaran.

col jkt lkt/kw92 jkt04285/5 shgr

0730 bynr
28715 z karawang

- 6 JAN 1990

Jkt

Kepada
Kepala Kantor Kas Negara
Karawang

tlg-2/d/1

06 JAN 19

Sehubungan diterbitkannya Surat Keputusan Pemerintah dan se-nya

2. Untuk hal tersebut di atas, agar Saudara memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Sehubungan dengan [illegible]

b. [illegible]

c. Mengenai tata cara pengisian [illegible]

d. Sehubungan dengan [illegible]

e. Untuk [illegible]

f. [illegible]

g. [illegible]

h. [illegible]

i. [illegible]

j. [illegible]

k. [illegible]

l. [illegible]

m. [illegible]

n. [illegible]

o. [illegible]

p. [illegible]

q. [illegible]

r. [illegible]

s. [illegible]

t. [illegible]

u. [illegible]

v. [illegible]

w. [illegible]

x. [illegible]

y. [illegible]

z. [illegible]

aa. [illegible]

bb. [illegible]

cc. [illegible]

dd. [illegible]

ee. [illegible]

ff. [illegible]

gg. [illegible]

hh. [illegible]

ii. [illegible]

jj. [illegible]

kk. [illegible]

ll. [illegible]

mm. [illegible]

nn. [illegible]

oo. [illegible]

pp. [illegible]

qq. [illegible]

rr. [illegible]

ss. [illegible]

tt. [illegible]

uu. [illegible]

vv. [illegible]

ww. [illegible]

xx. [illegible]

yy. [illegible]

zz. [illegible]

aaa. [illegible]

bbb. [illegible]

ccc. [illegible]

ddd. [illegible]

eee. [illegible]

fff. [illegible]

ggg. [illegible]

hhh. [illegible]

iii. [illegible]

jjj. [illegible]

kkk. [illegible]

lll. [illegible]

mmm. [illegible]

nnn. [illegible]

ooo. [illegible]

ppp. [illegible]

qqq. [illegible]

rrr. [illegible]

sss. [illegible]

ttt. [illegible]

uuu. [illegible]

vvv. [illegible]

www. [illegible]

xxx. [illegible]

yyy. [illegible]

zzz. [illegible]

aaaa. [illegible]

bbbb. [illegible]

cccc. [illegible]

dddd. [illegible]

eeee. [illegible]

ffff. [illegible]

gggg. [illegible]

hhhh. [illegible]

iiii. [illegible]

jjjj. [illegible]

kkkk. [illegible]

llll. [illegible]

mmmm. [illegible]

nnnn. [illegible]

oooo. [illegible]

pppp. [illegible]

qqqq. [illegible]

rrrr. [illegible]

ssss. [illegible]

tttt. [illegible]

uuuu. [illegible]

vvvv. [illegible]

wwww. [illegible]

xxxx. [illegible]

yyyy. [illegible]

zzzz. [illegible]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1810 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 30 Maret 1992 tenteng Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 22 Maret 1990 Nomor 640/SK.SO-KEU/1990 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Kerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan perincian sebagai berikut :

- Pemberian upah harian tiap bulan	=	Rp 30,000
- Pemberian uang pangan 25 Kg x Rp 625	=	Rp 13.125
- Tambahan penghasilan tiap bulan	=	Rp 10.000
Jumlah upah harian tiap bulan		Rp 53.125

(lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Ketiga : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah Serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar	Rp	41.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama	Rp	45.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas	Rp	50.000,00
d. Sarjana Muda	Rp	54.000,00
e. Sarjana Lengkap	Rp	63.000,00

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 16 Juli - 1992

KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I

SUDJONO NARTONO.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati de Kabupaten Daerah Tingkat II
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

SALINAN

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Bekasi

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR :642/SK.206-KEU/1992

TENTANG :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER DAERAH DAN KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah ditiap dinas dipekerjakan tenaga pukarelan dengan diberikan imbalan berupa upah kerja harian;

b. bahwa surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 22 Maret 1990 Nomor : 642/SK.73-KEU 1990 tentang Penetapan Upah Kerja Harian, Tenaga Honorer Daerah dan Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf b di atas mengenai besarnya upah kerja Harian, Tenaga Honorer dan Kontrak Kerja ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1310 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-805 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 30 Maret 1992 tentang Penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 22 Maret 1990 Nomor 540/SK.62-KEU/1990 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Kerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan perincian sebagai berikut :

- Pemberian upah harian tiap bulan	=	Rp 30.000
- Pemberian uang pangan 25 kg x Rp 525	=	Rp 13.125
- Tambahan penghasilan tiap bulan	=	Rp 10.000
Jumlah upah harian tiap bulan		Rp 53.125

(lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Ketiga : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar	Rp	41.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama	Rp	45.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas	Rp	50.000,00
d. Sarjana Muda	Rp	54.000,00
e. Sarjana Lengkap	Rp	60.000,00

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i

Pada tanggal : 16 JULI 1992

KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I

SUKO MARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

Pemerintah Kepala Daerah Tingkat II

B e k a s i

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 842/SK.25.A.Keu/1993.

TENTANG :

PENETAPAN UPAH KERJA HARIAN, TENAGA HONORER DAERAH DAN KONTRAK KERJA PEMERINTAH KABUPATEN D.T. II BEKASI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa mempekerjakan pekerja harian, tenaga honorer daerah dan kontrak kerja adalah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. bahwa memperhatikan perkembangan perekonomian dewasa ini, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 16 Juli 1992 Nomor 842/SK.286-Keu/1992 tentang Penetapan Upah kerja Harian, Tenaga Honorer Daerah dan Kontrak Kerja Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu ditinjau kembali untuk dinaikan,

c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana maksud huruf b di atas mengenai besarnya upah kerja Harian, Tenaga Honorer dan Kontrak Kerja perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang pelaksanaan APBD.

6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Pebruari 1993 Nomor 561/SK.2077-ORTALA/1993 tentang Upah minimum bagi pegawai Honor Daerah/Tenaga harian tetap di lingkungan Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N.

Menetapkan :

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 16 Juli 1992 Nomor 840/SK.286-KEU/1992 tentang Penetapan Upah Kerja Harian dan Tenaga Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Bekasi.

Kedua : Menetapkan kembali besarnya Upah Kerja Harian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemberian Upah Harian ditetapkan tiap hari sebesar Rp 2.500,00

2. Banyaknya jumlah hari kerja dalam satu bulan dihitung berdasarkan jumlah hari yang bersangkutan bekerja dengan dibuktikan dalam daftar hadir.

3. Tunjangan pangan diberikan dengan bentuk uang dengan ketentuan :

   a. Belum berkeluarga 10 kg beras
   b. Sudah berkeluarga 20 kg beras
   c. Harga beras per kg sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ketiga : Menetapkan kembali Upah Tenaga Honorer Daerah serta upah kontrak kerja setiap bulannya, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Sekolah Dasar	Rp	56.000,00
b. Sekolah Lanjutan Pertama	Rp	60.000,00
c. Sekolah Lanjutan Atas	Rp	65.000,00
d. Sarjana Muda	Rp	69.000,00
e. Sarjana Lengkap	Rp	78.000,00

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1993 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e k a s i
Pada tanggal : 23 Januari 1993

BUPATI KEPALA DAERAH T.K. II
B E K A S I

H. SUKO HARTONO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati ee Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
9. Para Kepala Dinas/Instansi/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

NOTA DINAS

DARI : Kepala Bagian Keuangan
KEPADA : Yth Bapak Bupati melalui Bapak Sekwilda
Perihal : Surat Keputusan Bupati tentang kenaikan Upah kerja Harian, Tenaga Honor, Kontrak Kerja dan biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemda Tk II Bekasi.

ISI NOTA

Terlampir disampaikan dengan hormat 2 buah rencana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi untuk mengganti Surat Keputusan yang lama yaitu:

1. Rencana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi perihal Upah Pegawai Harian, Upah Tenaga Kontrak Kerja/Honorer yang semula diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 842/SK.286-KEU/1992 tanggal 16 Juli 1992 disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat perihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil/ABRI, yang juga untuk hal ini telah mendapat arahan Bapak disana untuk kenaikan tersebut ditetapkan sebesar Rp 15.000,00/bulan untuk setiap pegawai dan telah dilaksanakan sejak pembayaran bulan Januari 1993.

2. Rencana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Bekasi tentang ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II Bekasi yang semula diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 090/SK.110A-KEU/1989 tangggal 29 April 1989 dirasakan sudah kurang sesuai lagi.

Dapat kami sampaikan pula bahwa dengan kenaikan tersebut :

a. Didasarkan kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S.217/MK.03/1985 tanggal 18 Pebruari 1985 tentang penyesuaian satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri masih dibawah ketentuan dimaksud.

b. Di dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tahun anggaran 1993/1994 anggaran belanja biaya perjalanan dinas telah ditingkatkan sebesar 30 % bila dibandingkan dengan anggaran belanja tahun anggaran 1992/1993.

c. Rincian perbandingan kenaikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

No	Golongan	Sk Bupati No 090/SK.110A/ Keu/1989	Rencana Sk baru	Kenaikan
1.	Gol IV	30.000,00	35.000,00	5.000,00
2.	Gol III	23.500,00	28.500,00	5.000,00
3.	Gol II	17.500,00	22.500,00	5.000,00
4.	Gol I	12.500,00	17.500,00	5.000,00
5.	Perjalanan pulang pergi kurang dari 6 jam bagi semua golongan	7.500,00	10.000,00	2.500,00
6.	Uang saku peserta penataran dan lain-lain :			
	- Gol IV	5.000,00	7.500,00	2.500,00
	- Gol III	4.000,00	6.000,00	2.000,00
	- Gol II	2.500,00	4.000,00	1.500,00
	- Gol I	1.500,00	2.500,00	1.000,00

Demikian semoga menjadi maklum, dengan harapan bila Bapak berkenan kiranya dapat menandatangani Rencana Surat Keputusan dimaksud menjadi Surat Keputusan sebagai landasan di dalam pelaksanaan selanjutnya.

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

BAKTI ASMADI

Penata
NIP. 010 047 588

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Pembantu Gubernur Wilayah IV Purwakarta;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat
6. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
7. Walikota Bekasi;
8. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II
9. Para Kepala Bagian/Dinas/Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah T.K. II Bekasi

DISARPUS KAB BEKASI